**Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi** e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 1 (2025): Februari, 186-192
DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.5777

# Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2022

**Devi Vera Handayani*, Endang**
Universitas Bojonegoro
*Correspondence: deviverahandayani@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan belanja daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Bali pada periode tahun 2015-2022. Menggunakan model *Common Effect Model* (CEM) dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Bali selama periode 2015-2022.

**Kata Kunci:** Ketimpangan**,** PDRB, Investasi, Belanja Daerah.

***Abstract.*** *This research aims to analyze the influence of economic growth, investment and regional spending on regional development inequality in Bali Province in the 2015-2022 period. Using the Common Effect Model (CEM) with panel data. The results of this research show that economic growth, investment and regional spending do not have a significant effect on development inequality that occurs in Bali Province during the 2015-2022 period.*

***Keywords:*** *nequality, GRDP, Investment, Regional Expenditures.*

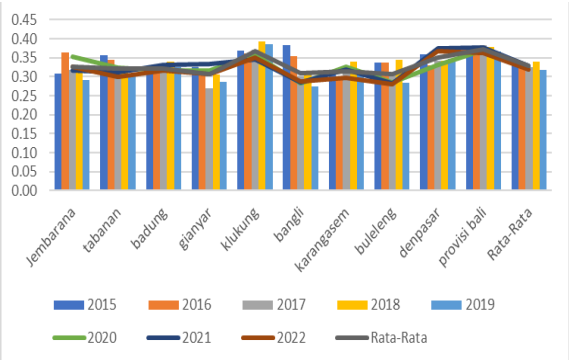
## PENDAHULUAN

Ketidakmerataan dalam pembangunan suatu wilayah sering kali menimbulkan masalah yang dapat berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan berujung pada meningkatkan kemiskinan diwilayah tersebut. Ketimpangan Pembangunan suatu wilayah merupakan isu yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Di Indonesia dengan keragaman geografis dan demografisnya, isu ini menjadi semakin kompleks. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, ketidakmerataan pembangunan masih menjadi tantangan besar (Auxiliadora et al., 2024). Permasalahan ini berakar pada akses yang tidak merata terhadap sumber daya, infastruktur, dan peluang ekonomi yang akhirnya mmenghambat kemajuan dan mobilitas Masyarakat (Fahmi & Benedictus, 2023). Oleh karena itu, dampak ketidakmerataan Pembangunan terhadap kesejahteraan mayarakat di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan wilayah daerah terjadi apabila terdapat perbedaan kemajuan yang besar antara daerah maju dan daerah kurang berkembang. Ketimpangan timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakerataan ini disebabkan karena adanya perbedaan antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya (Septiani, 2022). Hal ini disebabkan oleh daerah-daerah yang tertinggal, yang belum optimal dalam memanfaatkan potensinya secara optimal dan kekurangan sumber daya, baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur (Rosmeli, 2018). Ketimpangan ini mengakibatkan pembangunan tidak merata, dimana beberapa wilayah mengalami kemajuan pesat dan ada pula yang tertinggal. Terdapat kecenderungan untuk sektor-sektor ekonomi utama seperti industri, perdagangan, dan pertanian untuk terkonstrasi dibeberapa wilayah mempengaruhi. Namun, ini berpotensi memperburuk kemiskinan karena Pembangunan terkonsentrasi di satu wilayah tanpa memperhatikan keseluruhan masyarakat. Meskipun demikian, ketimpangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Mansyur et al., 2021). Selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal, tujuan utama pembangunan ekonomi juga harus mencangkup pengurangan kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Auxiliadora et al., 2024).

Ketimpangan Pembangunan bukanlah fenomena baru, dan sering kali terjadi dibanyak negara. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk pada kehidupan sosial dan

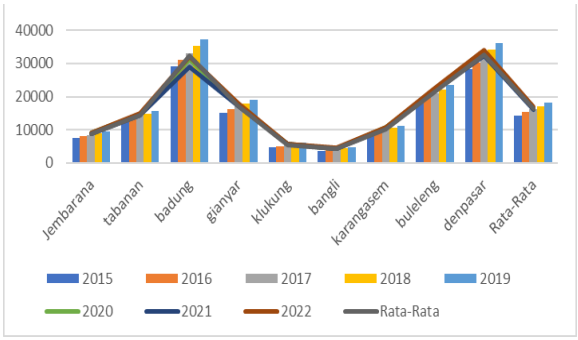
ekonomi, bahkan memicu konflik, setiap daerah memiliki ketimpangan berbeda-beda yang berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan (Sugiarti, 2023). Di Indonesia ketimpangan juga terjadi diberbagai wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Gorongtalo (Aufa, 2019). Selain itu ketimpangan juga menjadi masalah di Bali, ketimpangan ini juga terlihat jelas, terutama dalam sektor pariwisata (Novia, 2023). Kota Denpasar memiliki sumber daya yang cukup potensial dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan ini akan mengakibatkan beberapa wilayah berkembang dengan cepat, sementara yang lain berkembang lebih lambat, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Widiasari, 2019). Kemampuan untuk tumbuh ini kemudian menyebabkan dalam Pembangunan dan pendapatan antara daerah di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Gini ratio merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Indikator ini menunjukan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi apabila semakin tinggi nilai koefisiensi gini, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan. Sebalikanya rendah koefisiensi gini, semakin merata distribusi pendapatan (Mansyur et al., 2021).




Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

**Gambar 1**
**Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015-2022.**

Gambar 1 dapat dilihat bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah diprovinsi Bali yang diukur dengan gini ratio mengalami fluktuasi diberbagai kabupaten/kota di Bali antara tahun 2015-2022 yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi dan kebijakan. Terlihat bahwa Klungkung dan Denpasar memiliki nilai rasio sebesar 0.37 dan 0.35. Hal ini bahwa kedua daerah tersebut mengalami ketimpangan yang cukup tinggi. Sedangkan daerah Jembarana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli , Karangasem dan Buleleng memiliki nilai rasio sebesar 0.31, 0.32 dan 0.33 selama periode 2015-2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunya pendapatan perkapita, ketidakmerataan pembangunan daerah, dan rendahnya mobilitas sosial (Farhan, 2020)




Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

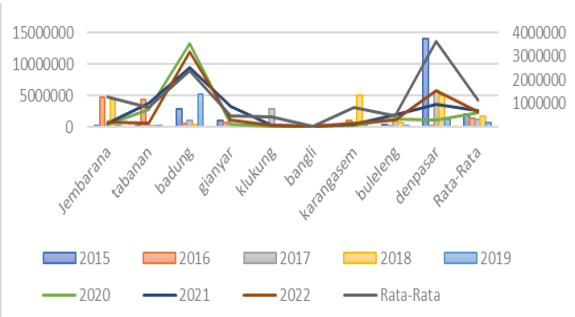
**Gambar 2**
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2015-2022**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Febriyani et al., 2022). Pembangunan ekonomi dianggap berhasil jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tigkat ketimpangan dinegara atau daerah tersebut (Nurfifah et al., 2022). Di era pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitas sumber daya manusia (Endang et al., 2024) Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sebagai destinasi wisata internasional menujukkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun, distribusi Pembangunan antar wilayah masih belum merata. Perbedaan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda sehingga berdampak pada kemiskinan di Provinsi Bali.

Gambar 2 terlihat bahwa wilayah seperti Badung dan Denpasar menunjukan tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan rata-rata Produk Dometik Regional Bruto (PDRB), sebesar 332.266 dan 32.546 juta rupiah selama periode 2015-2022. Hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dibandingkan wilayah lain seperti Bangli dan Klungkung, yang memiliki rata-rata

PDRB sebesar 4.244 dan 5.496 juta rupiah, jauh lebih rendah dibanding dengan wilayah yang lebih maju. tinginya PDRB di Badung dan Denpsar dapat dikaitkan dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat didaerah tersebut, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, investasi juga salah satu faktor lainnya juga berperan penting dalam menetukan seberapa besar kesenjangan pendapatan. Peningkatan produksi ini membantu lebih banyak tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Dengan begitu, pendapatan masyarakat akan meningkat dan kesenjangan diharapakan dapat berkurang (Febriyani et al., 2022). Investasi merupakan motor penggerak ekonomi sehingga pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi disemua daerah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Nurfifah et al., 2022). Perkembangan teknologi terkini yang kian pesat juga, memicu pertumbuhan Pasar Modal Indonesia agar dapat mendukung kebutuhan pasar yang ada. Pasar modal sendiri memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. Dengan adanya pasar modal, para investor dapat menyalurkan dananya disuatu efek yang terdapat di pasar modal (Noor et al., 2024). Hal ini menyebabkan wilayah tersebut lebih menarik bagi para investor untuk menanamkan modal, dan berdampak negatif dari segi ekonomi maupun politik (Rambey, 2018).

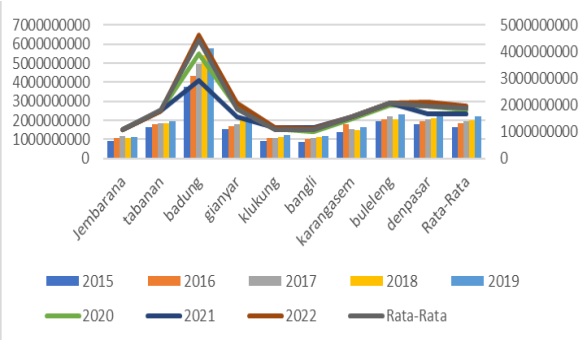



Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

**Gambar 3**
**Investasi Provinsi Bali Tahun 2015-2022**

Gambar 3 terlihat bahwa wilyah seperti Badung dan Denpasar menujukan nilai tingkat investasi dengan rata-rata investasi sebesar 2.405.426 dan 3.618.393 juta rupiah selama periode 2015-2022. Sedangkan Bangli dan Klungkung menujukkan bahwa memiliki nilai investasi yang rendah dengan rata-rata 29.198 dan 462.220 juta rupiah. Jauh lebih rendah dibanding Badung dan Denpasar yang lebih unggul dalam berinvestasi. Kurangnya investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya ketimpangan (Nurfifah et al., 2022).

Selain faktor investasi dan faktor pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor pengeluran pemerintah yang terus menigkat menunjukan peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Selain membiayai kegiatan rutin pemerintah juga menginvetasikan dana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengluaran pemerintah dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, penting untuk memeprhatikan dampak distribusnya (Novia, 2023). Di banyak negara, pengluaran pemerintah diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui berbagai program, seperti subsidi untuk kelompok Masyarakat berpendapatan rendah, peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan, serta pengembangan infastruktur didaerah terpencil (Rosmeli, 2018). Dengan demikian pemerintah berupaya menciptakan peluang yang lebih setara bagi semua lapisan Masyarakat.




Sumber: BPS Provinsi Bali (2024)

**Gambar 4**
**Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2022**

Gambar 4 terlihat bahwa wilayah Badung dan Buleleng memiliki nilai rata-rata pengluaran pemerintah yang tinggi dengan anggaran belanja daerah, sebesar 4.455.990.385 dan 2.092.629.829 pada periode 2015-2022. Hal ini menujukan bahwa tingkat aktivitas pembangunan dan kebutuhan layanan publik pada kedua wilayah tersebut. Sebaliknya, dengan Jembarana dan Bangli yang memiliki rata-rata yang lebih rendah, sebesar 1.070.121.629 dan 1.084.394.198 jauh lebih rendah menunjukkan bahwa tingkat aktivitas Pembangunan dan kebutuhan publik yang cenderung relative dalam mengahadapi variasi pendapatan nasional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintahan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2022.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan data panel yaitu gabungan dari *time series* selama periode 2015-2022 dan *cross section* yaitu 9 kabupaten di Provinsi Bali (Harahap, 2022). Data diperoleh dari website berupa badan pusat statistik (BPS) di Provisi Bali. Variabel yang digunakan dalam penilitian ini adalah varibael dependent yang digunakan adalah gini ratio (Y), dan variabel dependent PDRB (X1), investasi (X2), belanja Daerah (X3).

Analisis data yang digunakkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$Yit = \beta0 + \beta1X1it + \beta2X2it - \beta3X3it+e$

Keterangan: Yit adalah ketimpangan pembangunan di wilayah i pada periode t; X1it adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah i pada periode t; X2it adalah investasi di wilayah i pada periode t; X3it adalah pengeluaran pemerintah di wilayah i pada periode t; β0 adalah konstanta; β1, β2, β3 adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen; dan e adalah error

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel yaitu, pendekatan *Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect* (Rahmadi, 2018). Pemilihan model data panel melalui uji Chow dan uji Hausman dan ui Langgrange Multiplier, untuk menentukan model mana yang terbaik. Dari ketiga uji tersebut maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model*. Sebelum analisis uji asumsi klasik seperti Multikonlineritas dan Heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan validitas model (Rizka Hadya, Nova Begawati, 2017). Menurut Napitupulu et al (2021) jika model Common Effect Model (CEM) hanya memerlukan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas sebagai uji asumsi klasik.

## HASIL

**Tabel 1**
**Pemilihan Model Panel**

| | Sig | Uji Chow | Uji Hausman | Uji LM |
|---|---|---|---|---|
| **Prob** | 0,05 | 0,6709 | 0,5553 | 0,3652 |

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 1 hasil dari uji Chow menujukkan nilai probabilitas 0,6709 > 0,05, maka menolak hipotesis nol. Sehingga berdasarkan uji Chow yang lebih baik digunakkan adalah model *Fixed Effect* dari pada model *Common Effect*. Hasil dari uji Hausman menunjukan nilai probabilitas 0,5553 > 0,05, maka menolak hipotesis nol. Sehingga berdasrkan uji Hausman yang lebih baik digunakkan adalah model *Random Effect* dari pada *Fixed Effect*. Sedangkan hasil dari uji *Lagrange Multiplier* menunjukan nilai probabilitas 0,3652 > 0,05, maka menolak hipotesis nol. Sehingga berdasarkan uji Hausman yang lebih baik digunakkan adalah model *Common Effect* dari pada *Random Effect*. Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hausman, dan uji LM maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

**Tabel 2.**
**Hasil Penelitian**

| | PDRB (X1) | Investasi (X2) | Belanja Daerah (X3) | Prob | Koefisien |
|---|---|---|---|---|---|
| Konstanta | | | | | 0.3289 |
| PDRB (X1) | 1.000000 | 0.370097 | 0.776291 | 0.4018 | $4.68 \times 10^{-7}$ |
| Investasi (X2) | 0.370097 | 1.000000 | 0.229566 | 0.1209 | $2.97 \times 10^{-9}$ |
| Belanja Daerah (X3) | 0.776291 | 0.229566 | 1.000000 | 0.5710 | $-8.04 \times 10^{-12}$ |

Sumber : data olahan

Tabel 2 hasil uji multikolinieritas didapatkan bahwa koefisiensi korelasi X1 dan X2 sebesar 0,370097 < 0,85; X1 dan X3 sebesar 0,776291< 0,85 dan X2 dan X3 sebesar 0,22956 < 0,85; maka dapat dikatakan bahwa model penelitian ini terbebas multikolinieritas (Napitupulu et al., 2021). Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas nilai probabilitas X1 sebesar 0,4018 > 0,05; X2 sebesar 0,1209 > 0,05; dan X3 sebesar 0,5710 > 0,05; maka dapat dikatakan bahwa model penelitian ini terbebas heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

Tabel 2 juga diperoleh persamaan regresi linier berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Yit = 0,3289 + 4,68 x $10^{-7}$X1 + 2,97 x $10^{-9}$X2 – 8,04 x $10^{-12}$X3 + e. Persamaan model ini menjelaskan bahwa: nilai kostanta sebesar 0,3289 ketika variabel independent {dalam hal ini variabel PDRB (X1), Investasi (X2) dan belanja daerah (X3)} bernilai nol maka nilai variabel dependent (dalam hal ini gini rasio) akan tetap sebesar 0,3289. Koefisien regresi variabel X1 (dalam hal ini PDRB) sebesar 4,68 x $10^{-7}$; artinya apabila X1 naik 1% akan membuat variabel dependent (dalam hal ini gini rasio) akan meningkat sebesar 4,68 x $10^{-7}$. Koefisien regresi variabel X2 (dalam hal ini investasi) sebesar 2,97 x $10^{-9}$; artinya apabila X2 naik 1% akan membuat varibel dependent (dalam hal ini variabel gini rasio) akan meningkat sebesar 2,97 x $10^{-9}$. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X3 (dalam hal ini variabel belanja daerah sebesar minus 8,04 x $10^{-12}$), artinya apabila X3 naik 1% akan membuat variabel gini rasio menurun sebesar 8,04 x $10^{-12}$.

*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Terhadap Ketimpangan*

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (Y) di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai probability sebesar 0,4018 > 0,05; hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, peningkatan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, tidak secara langsung memengaruhi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Bali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Novia (2023) dan Rambey (2018) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan suatu wilayah. Berbeda dengan penelitian Nurfifah et al (2022) dan Harahap (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, secara tidak secara langsung berkontribusi pada pengurangan ketimpangan di suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan karena berbagai faktor, seperti struktur perekonomian yang tidak merata, atau mekanisme distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang belum optimal.

*Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan*

Hasil penelitian menunjukan bahwa penanaman investasi di Provinsi Bali (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (Y) yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai probability sebesar 0,1209 > 0,05; yang mengindikasikan bahwa hubungan antara investasi dan ketimpangan pembangunan tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Dengan kata lain, peningkatan maupun penurunan investasi di Provinsi Bali, tidak secara langsung memengaruhi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mansyur et al (2021) dan Harahap (2022) yang menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan suatu wilayah. Namun berbeda dengan penelitian Nurfifah et al (2022) dan Kiton (2019) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan suatu wilayah. Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang fokus pada peningkatan investasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan. Strategi yang lebih terarah diperlukan untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan merata di semua wilayah.

*Pengaruh Pengluaran Pemerintah (Belanja Daerah) Terhadap Ketimpangan*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah di Provinsi Bali (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (Y) di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai probability sebesar 0,5710 > 0,05, yang mengindikasikan bahwa hubungan antara belanja daerah dan ketimpangan pembangunan tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Artinya, baik peningkatan maupun penurunan belanja daerah tidak secara langsung memengaruhi ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mansyur et al (2021) dan Nurain & Juliannisa (2022) yang menyatakan bahwa pengluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan suatu wilayah. Berbeda dengan penelitian Novia (2023) bahwa pengluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan wilayah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun belanja daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong

pembangunan, namun pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan tidak signifikan. Hal ini dimungkinkan berbagai faktor, seperti mekanisme alokasi belanja daerah yang belum optimal atau peran faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat ketimpangan pembangunan.

**Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Bali selama periode 2015-2022. Artinya, perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja daerah tidak berdampak pada ketimpangan pada suatu wilayah,

**DAFTAR PUSTAKA**

Aufa Nadya1, S. 2019. Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *27*(1), 37–52.

Auxiliadora, I., Marcal, F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. 2024. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Perekonomian Suatu Negara. *2*(3), 40–47.

Endang, Astuti, H., & Udyana, T. 2024. Analisis Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Panel Data 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *24*(2), 155–165.

Fahmi, N., & Benedictus, S. 2023. Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *12*(2), 45–56.

Febriyani, A., Anis, A., 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, *3*(4), 375–375.

Harahap, S. H. 2022. Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *11*(3).

Ita Yunira Septiani, E. 2022. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2020. *9*(1), 356–363.

Kiton, M. A. 2019. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *3*(2), 68–80.

Kurniati Mansyur, Nursini, & Hamrullah. 2021. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *1*(2)

Muhammad Farhan1, S. 2020. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *1*(4), 243–258.

Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Lumminar Hutabarat, H., Damanik, H. H., Ronnie Togar Mulia Sirait, A., & Tobing, C. E. R. L. 2021. *Penelitian Bisnis: Teknik Dan Analisa Data Dengan SPSS - STATA - EVIEWS. Madenatera 1:230.*

Noor, F., Susilo, J. H., & Budianto, B. 2024. Pengetahuan Investasi, Modal Minimum, dan Persepsi Keuntungan Terhadap Minat Berinvestasi di Saham. *Jurnal EMA*, *9*(1), 66.

Novia, T. 2023. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pekerja Berpendidikan Sma Ke Atas, Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Bali Tahun 2016-2020. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *5*(2), 1.

Nurain, H., & Juliannisa, I. A. 2022. Pendapatan Pada Lima Provinsi Tertimpang Di Indonesia. *18*(April).

Nurfifah, R., Walewangko, E. N., & Masloman, I. 2022. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Ketimpangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmu Efisiensi*, *22*(5), 25–36.

PIke Sugiarti, R. E. 2023. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2021. *5*, 2427–2441.

Rahmadi, S. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *7*(3), 111–126.

Rambey, M. J. 2018. Analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, *5*(2), 32–36.

Rizka Hadya, Nova Begawati, I. Y. 2017. Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel. *1*(3), 153–166.

Rosmeli, A. M. D. Z. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *7*(1), 15–25.

Widiasari, H. 2019. Analisis Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, *4*(4), 195–202.